



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia
Telepon.3500901; Fax. 3521967

**NOTULEN RAPAT
TIM PELAKSANA EITI**

Hari/Tanggal	:	Selasa, 22 Desember 2015
Waktu	:	09.30 – 12.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Utama Lantai 4, Gedung A.A. Maramis II Kemenko Bidang Perekonomian, Republik Indonesia Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
Agenda	:	1. Rencana Kerja Tahun 2016 2. Pembahasan Kerangka Acuan Tim Pelaksana 3. Pembahasan Scoping Study Laporan Tahun 2014 4. Pembahasan Revisi Perpres No. 26/2010
Peserta Rapat Pemerintah	:	1. Kementerian Perekonomian, Deputi III, diwakili : Montty Giriana, Andi Novianto, Eko Wahyu P 2. Ditjen Migas, Kementerian ESDM, diwakili : Tobia Parulian 3. Ditjen Pajak, diwakili : Merry Lidya, Cintya Dewi M, Bayu R Rahayu, Ahmad Zaky Zamani, Chenris C 4. Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, diwakili : Sigit Harjanto 5. Kemenko Perekonomian, Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter, diwakili : Kuspradoto B, Dody 6. BPKP, diwakili : Endang Martiwi 7. SKK Migas, diwakili : Wisnu P Taher, Selvi, Arlita Puspawati 8. Sekda Prov. Riau, diwakili : Syahrial Abdi, H Masperi
Asosiasi Industri dan Perusahaan	:	APBI-ICMA, diwakili : Hendra Sinadia
BUMN	:	Pertamina, diwakili : Aji S, Korfi Prita. Tb Herman W
Masyarakat Sipil	:	PWYP, diwakili : Aryanto, Yesi M, Dewi Y H
Bank Dunia	:	Noriko Toyoda
Sekretariat EITI	:	1. Edi Effendi Tedjakusuma 2. Ronald Tambunan 3. Agus Trianto 4. Doni Erlangga 5. Tri Wicaksono 6. Aniesya Sefia Anggraeni

A. PEMBUKAAN

Pembukaan disampaikan oleh Bapak Montty Giriana : Mengucapkan selamat kepada seluruh tim pelaksana dan sekretariat karena status suspend sudah dihilangkan jadi sekarang kita menjadi negara yang compliance atas standard EITI. Mengucapkan selamat tahun baru dan selamat berlibur. Hari ini akan membahas program kerja untuk tahun 2016-2017 dimana kita akan menghadapi

validasi, harus menyelesaikan laporan selanjutnya. Mempersilahkan Bapak Edi untuk memberikan penjelasan terkait dengan Draft laporan EITI 2012-2013.

B. PENYAMPAIAN, PEMBAHASAN & TANGGAPAN

Penyampaian Bapak Edi terdapat 4 agenda yang akan kita bahas pada hari ini yaitu workplan dan scoping note sudah dibahas pada acara strategic retreat kemudian dilanjutkan pada rapat tim teknis tanggal 7 Desember 2015, kemudian untuk revisi Perpres sudah disirkuler beberapa kali dan masih menunggu status Indonesia menjadi negara compliance, yang terakhir adalah TOR MSG adalah semacam SOP dari rapat tim pelaksana untuk pengambilan keputusan dan lain-lain. Mengenai langkah-langkah dalam penyusunan workplan (Standard EITI 2013), agenda pembangunan nasional terkait Industri Ekstraktif (RPJMN 2015-2019) sebagai acuan prioritas nasional, tujuan pelaksanaan EITI. Dari prioritas nasional yang sudah disepakati tadi dan sudah merumuskan tujuan, kemudian menyusun tujuan dan sasaran pada 2016-2017 yang meliputi peningkatan transparansi pengelolaan industri ekstraktif dengan sasaran tersusunnya laporan EITI Indonesia, terlaksananya sosialisasi laporan EITI dan isu-isu EITI secara luas, terlaksananya diskusi publik sebagai tindak lanjut rekomendasi laporan EITI, terlaksananya peningkatan kapasitas pelaksanaan EITI, peningkatan kualitas laporan EITI; terlaksana terjadinya perbaikan tata kelola pengembangan industri ekstraktif berkelanjutan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat di daerah pertambangan dengan sasaran terlaksananya impact assesment, terlaksananya pengembangan dan revisi peraturan per-UU-an terkait industri ekstraktif; peningkatan kontribusi industri dalam ekonomi nasional dengan sasaran terlaksananya sosialisasi tentang transparansi pengelolaan industri ekstraktif kepada investor. Rationable workplan EITI Indonesia 2016-2017 meliputi *objective, rationable:Governance related challenges and obstacles in the sector, activities 2016-2017, outcomes, responsible party, timeline, cost, funding source*. Kemudian menjelaskan tentang timeline workplan. Selanjutnya Bpk. Edi meminta masukan dari Bapak Montty dan Bapak/Ibu dari apa yang telah disampaikan.

Bapak Montty : ada 3 hal yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah pada tahun depan kita harus melakukan kajian yang spesifik, yang kedua ilmu transparansi itu signifikan maju sehingga kita harus mengadakan kegiatan enhancement stakeholder baik pemerintah maupun CSO dan industri, yang ketiga kita harus membina komunikasi yang baik dengan industri karena setiap tahun kita meminta data sehingga mereka akan terbuka kepada kita, dan yang terakhir apakah merevisi undang-undang merupakan keputusan terbaik, kalau mau memberikan masukan kalau nanti ada review terhadap undang-undang.

Bapak Edi : untuk meriview undang-undang dari laporan tahun 2012-2013 kita menghadapi hambatan antara lain dikarenakan adanya peraturan undang-undang yang tidak sesuai dengan EITI standard dari berbagai macam aspek, apabila dapat direvisi dan sejalan dengan EITI standard kita akan sarankan seperti itu, kalau seandainya tidak dapat merevisi dengan berbagai macam alasan kita akan mematuhi undang-undang yang berlaku. Enhancement dengan stakeholder sudah kita mulai kemarin dengan mengundang dari Lemhanas, KIP dan juga ESDM melalui FGD. Kemudian komunikasi dengan industri ini akan kita lakukan di tahun 2016, tidak hanya dengan industri tetapi juga dengan Kementerian termasuk dengan Pemerintah Daerah. Terima kasih atas masukan dari Bapak Montty nanti kami akan menindaklanjuti.

Bapak Aryanto : ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan usulan kajian baik temuan maupun rekomendasi pada tahun 2016, ada beberapa temuan yang sebenarnya dapat langsung dieksekusi tanpa harus melakukan kajian, pada tahun 2016-2017 ada beberapa regulasi yang akan direvisi oleh DPR. Persiapan untuk validasi agar status kita masih tetap compliance pada saat validasi nanti. Soal strategi komunikasi perlu juga mencari kegiatan diluar televisi dan radio.

Bapak Syahril Abdi : Untuk scoping daerah sebaiknya diperluas karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, masukan dalam merevisi undang-undang nomor 23 agar sejalan sehingga tidak mengambat hal-hal yang akan kita lakukan. Kami dari Provinsi Riau sangat mendukung transparansi ke daerah-daerah.

Bapak Montty : kalau daerah itu yang spesifik tidak dalam standard EITI ?

Bapak Edi : paling tidak tentang dana bagi hasil belum terlalu detil, apabila datanya ada akan dimasukan ke SOP yang selanjutnya.

Bapak Hendra Sinadia : terkait dengan revisi undang-undang untuk coba membuat usulan yang bentuknya lebih konkrit jadi semacam paper agar disampaikan pada Komisi VII DPR sebagai pembuat undang-undang.

Ibu Selvi : masalah pembukaan data yang sampai saat ini masih berbayar, pada prinsipnya hal tersebut bisa saja diusulkan untuk tidak berbayar tetapi hanya by request.

Bapak Aryanto : soal momentum, jangan sampai ketinggalan momentum (review belum selesai, revisi sudah diputuskan).

Bapak Ahmad Zaky : pandangan yang sedikit berbeda mengenai niat kita di workplan 2016, apabila dilihat kegiatannya memang untuk merevisi perundang-undangan namun perlu kita ingat juga bahwa sering kali berbicara tentang transparansi dan aktualitas masalahnya tidak hanya dalam perundang-undangan saja, mungkin bisa ditambahkan atau dirubah peraturan perundangan/peraturan terkait.

Ibu Noriko : capacity building dan komunikasi merupakan suatu hal yang penting, sebaiknya bukan hanya tentang standard EITI akan tetapi juga tentang transparansi di setiap sektor, kita akan mengundang seluruh MSG dan sekretariat untuk capacity building.

Penyampaian Bapak Edi mengenai scoping note, pada intinya kita telah membuat scoping note tahun 2012-2013 akan tetapi belum lengkap, saat ini kita mengupdate dimana telah dilakukan 2 kali pertemuan yang khusus meminta masukan tentang scoping note. Requirement 3.2 legal framework and fiscal regime pada laporan 2012-2013 sudah dibahas cukup baik, untuk tahun 2014 diusulkan untuk menambahkan beberapa isu tentang review dalam merevisi beberapa perpres (UU nomor 25, Permen ESDM nomor 15, draft revisi UU PNPB).

Requirement 3.3 overview pada laporan 2012-2013 sudah disebutkan perusahaan yang sedang melakukan eksplorasi di bidang migas tetapi bidang minerba belum ada. Requirement 3.4 contribution of extractive sector to the economy, diusulkan agar adanya kontribusi terhadap perekonomian lokal, ASR dan CSR sudah ada mungkin perlu lebih diperdalam lagi nanti. Requirement 3.5 production data, data produksi minyak perlu disajikan dalam volume, profile data produksi dan investasi selama 5 tahun berdasarkan laporan EITI. Requirement 3.6 sudah lengkap. Requirement 3.7 distribution of revenue, perhitungan DBH lebih detil agar per kabupaten, per perusahaan, per wilayah kerja. Requirement 3.8, masih sama, tidak ada tambahan dan tidak ada usulan. Requirement 3.9, data pemilik ijin dan koordinat belum dapat disampaikan, menyajikan data online kadastral berbayar, kami sarankan untuk dapat dibuka tetapi tergantung dari kesepakatan tim teknis. Requirement 3.10 dilengkapi dengan informasi peserta lelang di masing-masing wilayah kerja. Requirement 3.11, dilengkapi dengan data pemilik aset dan pemegang saham perusahaan. Requirement 3.12, keseluruhan isi kontrak dapat dibuka, kembali tergantung diskusi dengan ESDM.

Usulan dari SKK Migas tentang firm commitment yaitu penalti yang diberikan kepada kontraktor apabila mereka tidak dapat melaksanakan komitmen dalam 3 tahun pertama (tidak bisa

direkonsiliasi). Penerimaan dari pemindahtanganan/pemanfaatan aset (sewa aset), kadang-kadang aset kegiatan migas digunakan oleh pihak lain (pihak diluar kontraktor dari industri hulu) sehingga mereka dikenakan sewa ke kas negara. Participating interest, 10% kepada BUMD perlu diinformasikan secara spesifik mengenai prosesnya.

Data rekonsiliasi, data-data yang sudah kita dapatkan, penerimaan negara dari sumber daya alam tahun 2014 adalah IDR 240.848.282.407.860 (sumber LKPP), dari sub sektor migas adalah USD 26.762.465.000 (sumber SKK Migas), dari sub sektor Minerba adalah IDR 38.238.790.841.647 terdiri dari IDR 5.509.299.255.269 + USD 2.630.988.069 (sumber Ditjen Minerba).

Bapak Andi : sebagian besar TOR mengacu kepada laporan yang telah kita selesaikan pada tahun ini, ada beberapa catatan yang perlu kita perbaiki, apakah akan dimasukkan pada scoping note 2014. Saya meminta masukan dari beberapa hal yang telah disampaikan berkaitan dengan scoping note.

Ibu Selvi : mengenai perusahaan Minerba seharusnya makin kedepan harus lebih baik dalam peningkatan materialitasnya atau minimal sama.

Ibu Endang : Direktur Pengawasan Sumber Daya Alam di BPKP sebaiknya diikutsertakan dalam rapat karena data banyak di Beliau.

Bapak Ahmad Zaky : banyaknya perusahaan batubara yang sudah tutup karena adanya penurunan harga sehingga kesulitan untuk memberikan data.

Ibu Noriko : jumlah perusahaan yang tidak melapor bukan merupakan penilaian dan tidak menjadikan penilaian menjadi buruk.

Ibu Selvi : data produksi di Migas adalah lifting dan hanya volume saja tidak ada harganya. Bisa direkonsiliasi dari data produksi perusahaan dan SKK Migas tetapi tidak diwajibkan.

Bapak Wisnu : harus hati-hati dengan data produksi, harus dijelaskan tentang stock, losses dan lain-lain.

Bapak Edi : untuk data kontekstual tidak harus tahun berjalan, jadi peraturan-peraturan tidak harus tahun tersebut. Asal untuk perbaikan tata kelola.

Bapak Ronald : eskplorasi yang signifikan adalah sudah masuk tahap studi kelayakan.

Ibu Selvi : kontrak yang full disclosure, secara umum sudah dibuka hak dan kewajiban dlm kontrak yang tidak dibuka adalah angkanya. Signature bonus, koordinat belum bisa dibuka.

Bapak Indra : dari APBI sama dengan SKK migas. Disclosure untuk hak dan kewajiban.

Ibu Endang : Tidak perlu dibuka semua, Apa manfaatnya buat kita?

Bapak Andi : di tahun 2016 terdapat materialitas sebesar 20M.

Bapak Aryanto : CSO minta ditambah, dikaitkan dengan kemampuan CSO di masing-masing sub sektor (misalnya migas atau minerba). BP migas dan SKK migas apakah bisa dijadikan satu sebagai pihak Pemerintah.

Bapak Andi : terdapat tambahan untuk usulan scoping tahun 2014 dari nomor 1-10 apakah sudah dapat disetujui?

Bapak Aryanto : untuk scoping rekonsiliasi kami masih membahas dikalangan CSO, sehingga belum bisa memberikan pendapat selain batas materialitas juga apa saja yang akan direkonsiliasi. Kalau untuk yang kontekstual lebih baik sesuai dengan standrad saja, untuk pelaksanaannya apabila ada yang tidak bisa sesuai dengan scoping baru kita diskusikan. Soal data produksi pada nomor 4, hanya ada dari Migas, bagaimana dengan Minerba?

Pak Edi : saya sepakat menggunakan scoping yang lalu, usulan saat ini sebetulnya hanya sedikit tambahan saja. Untuk data produksi baik dari sektor Migas dan Minerba yang pada laporan sebelumnya belum disampaikan dapat kita perkaya, kemudian DBH dikarenakan dari DJPK apabila datanya ada kita bisa masukan ke dalam laporan selanjutnya.

Ibu Selvi : terkait dengan data produksi di tahun 2012-2013, tidak ada value nya.

Bapak : sebaiknya tetap harus dikasih catatan terkait dengan data produksi sebagai informasi tambahan apabila hal tersebut mau di nilai menurut saya harus dipertimbangkan kembali, apabila data tersebut sebagai informasi jangan memikirkan untuk dievaluasi.

Bapak Edi : Definisi eksplorasi yang signifikan adalah eksplorasi yang bisa masuk ke studi kelayakan.

Ibu Selvi : sebenarnya pada laporan tahun 2012-2013 sudah full disclosure hanya aja number dan titik koordinat belum dapat dibuka.

Bapak Andi : dimohon apabila ada masukan tambahan dapat disampaikan ke sekretariat.

Penyampaian Bapak Ronald mengenai rencana revisi Perpres No 26 tahun 2010 yang menjadi landasan hukum dari pelaksanaan EITI selama ini. Latar belakang permohonan revisi ini diajukan dikarenakan adanya perubahan struktur kabinet pada Pemerintah/Kementerian/Lembaga, adanya standard baru EITI 2013, upaya kita untuk meningkatkan kepedulian dari para stakeholder dan instansi terkait. Secara garis besar revisi perpres terdapat pada matriks yang telah disirkulasi. Kemudian kami mohon masukan dari Bapak/Ibu sekalian.

Bapak Aryanto : pada pasal 14 mungkin sebaiknya SKK Migas dicoret saja karena bagian dari Pemerintah Pusat. Tambahan ayat pada pasal 14 yaitu ayat 4, dalam penulisan laporan seluruh anggota tim pelaksana berkewajiban untuk menginformasikan data. Untuk selengkapny akan saya kirimkan melalui email kepada Bapak Ronald.

Bapak Edi : saya kira tidak dapat kita selesaikan sekaligus, nanti kita akan melanjutkan pembahasan yang lebih detil pada rapat tim teknis. Diharapkan untuk dapat menyampaikan masukan baik secara lisan maupun tertulis.

Penyampaian Bapak Edi mengenai kerangka acuan (TOR), sudah disampaikan pada rapat tim teknis. Kerangka acuan ini terdiri dari, Tujuan Pelaksanaan EITI; Peran, Hak dan Kewajiban Tim Pelaksana; Tim Pelaksana; Tata Cara dan Aturan. Saya kira masih banyak masukan dari Bapak/Ibu sekalian baik secara lisan saat ini maupun tertulis melalui email dan akan kita bahas lebih detil pada saat rapat tim teknis.

Bapak Edi : apabila tidak ada masukan lagi dari Bapak/Ibu, kami akan mencoba menfinalisasi masukan dari Bapak/Ibu untuk workplan dan scoping karena hal tersebut yang paling penting untuk acuan kita kedepan, kalau bisa sebelum 31 Desember 2015. Rapat Tim Teknis dijadwalkan di Minggu ke 2 bulan Januari.

C. HASIL KESEPAKATAN RAPAT

Hal yang telah disepakati :

1. Tahun depan kita harus melakukan kajian yang spesifik, mengadakan kegiatan enhancement stakeholder baik pemerintah maupun CSO dan industri, membina komunikasi yang baik dengan industri.
2. Agar scoping untuk daerah sebaiknya diperluas karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda.
3. Keanggotaan CSO agar ditambah, dikaitkan dengan kemampuan CSO di masing-masing sub sektor (misalnya migas atau minerba).
4. Tetap diberikan catatan terkait dengan data produksi sebagai informasi tambahan apabila hal tersebut mau dinilai, harus dipertimbangkan kembali, apabila data tersebut sebagai informasi jangan dijadikan untuk evaluasi.
5. Masukan untuk workplan dan scoping secara tertulis ditunggu sebelum 31 Desember 2015. Rapat Tim Teknis dijadwalkan di Minggu ke-2 pada bulan Januari.

Jakarta, Desember 2015
Mengetahui,

A.N. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,
Selaku Ketua Tim Pelaksana Transparansi
Industri Ekstraktif

ttd

Andi Novianto
Asisten Deputi Produktivitas Energi